

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap wilayah atau daerah umumnya mempunyai masalah dalam proses pembangunannya. Masalah yang sering muncul di dalam wilayah tersebut yang paling besar adalah masalah ketimpangan pembangunan ekonomi dan kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat, dan antara daerah satu dengan daerah yang lain merupakan suatu hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah. (Williamson, 2008). Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal dan horizontal yakni perbedaan pada distribusi pendapatan, serta secara horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2008).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan sebuah proses dimana pemerintah daerah itu sendiri dan masyarakat, yang mengelolah sumber daya yang ada dan membangun pola yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tolak ukur suatu keberhasilan pembangunan dalam wilayah tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan suatu ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecil ketimpangan pembangunan yang terjadi antara wilayah. Pembangunan juga mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional baik negara maju maupun negara terbelakang, baik yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran. Seperti kita telah mengetahui bahwa pembangunan itu akan berhasil dilihat

berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional yang ada di setiap daerah.

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di wilayah atau daerah tersebut dengan seluas-luasnya. Akan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut banyak sekali tantangan yang dihadapi baik dalam Negeri maupun luar Negeri. Sehingga wilayah tersebut memiliki kerja sama yang kuat agar pembangunan wilayah tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dimana keadaan ekonomi yang ada di masing-masing wilayah, dapat meningkatkan pendapatannya dan untuk mencapai pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial serta memperluas kemampuan dan akses perlindungan sosial. Dalam 30-40 terakhir telah terjadi peningkatan standar hidup masyarakat, seperti usia harapan hidup masyarakat semakin panjang, kematian ibu dan bayi semakin menurun, kemampuan membaca dan angka partisipasi sekolah juga mebaik.

Menurut UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi : “ Semua produksi dan faktor produksi serta hak milik perseorangan haruslah mempunyai fungsi sosial untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Agar masing-masing memikirkan, memperhatikan, dan mengupayakan keadaan sosial ekonomi budaya bersama, dan memanfaatkan sebagian rezeki penghasilan pendapatan kekayaan kepintaran, kekuatan kemampuan untuk kepentingan bersama

Tabel 1
Perkembangan Ketimpangan Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun
2015-2019.

Kabupaten/Kota	Ketimpangan Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun		
	2015	2016	2017
Tahun	2015	2016	2017
Kab. Pacitan	0,33	0,36	0,32
Kab. Ponorogo	0,36	0,36	0,34
Kab. Trenggalek	0,37	0,39	0,35
Kab. Tulungagung	0,36	0,37	0,35
Kab. Blitar	0,33	0,34	0,37
Kab. Kediri	0,34	0,38	0,34
Kab. Malang	0,38	0,32	0,35
Kab. Lamajang	0,29	0,35	0,31
Kab. Jember	0,33	0,31	0,34
Kab. Bayuwangi	0,34	0,33	0,34
Kab. Bondowoso	0,32	0,35	0,32
Kab. Situbondo	0,33	0,35	0,33
Kab. Probolinggo	0,30	0,31	0,36
Kab. Pasuruan	0,32	0,32	0,34
Kab. Sidoarjo	0,35	0,37	0,34
Kab. Mojekerto	0,31	0,30	0,32
Kab. Jombang	0,37	0,34	0,34
Kab. Nganjuk	0,35	0,36	0,33
Kab. Madiun	0,32	0,34	0,32
Kab. Magetan	0,34	0,37	0,39
Kab. Ngawi	0,34	0,34	0,34
Kab. Bojonegoro	0,32	0,32	0,29
Kab. Tuban	0,29	0,33	0,31
Kab. Lamongan	0,30	0,30	0,32
Kab. Gresik	0,31	0,33	0,29
Kab. Bangkalan	0,32	0,31	0,30
Kab. Sampang	0,30	0,31	0,29
Kab. Pamekasan	0,34	0,36	0,33
Kab. Sumenep	0,26	0,31	0,45
Kota. Kediri	0,40	0,39	0,40
Kota. Blitar	0,37	0,41	0,39

Kota Malang	0,38	0,41	0,42
Kota. Probolinggo	0,36	0,31	0,37
Kota. Pasuruan	0,39	0,40	0,38
Kota. Mojokerto	0,36	0,37	0,39
Kota. Madiun	0,38	0,42	0,36
Kota. Surabaya	0,42	0,39	0,39
Kota. Batu	0,36	0,34	0,30

Sumber : BPS Dinamis Provinsi Jawa Timur 2018

Tabel 1 menggambarkan perkembangan ketimpangan wilayah Jawa Timur. Tahun 2015 tingkat ketimpangan tertinggi berada di kota Surabaya, dan 2016 berada di kota Madiun, namun nilai tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan ketimpangan paling rendah berada pada tahun 2017 di Kab. Bojonegoro, Kab. Sampang, dan Kab. Gresik.

Ketimpangan pembangunan setiap wilayah selalu memiliki perbedaan, maka dari itu perlu perhatian yang serius dari pemerintah untuk merealisasikan kembali, serta strategi apa yang dilakukan agar pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Timur merata kembali. Untuk dapat melaksanakan kebijakan yang dapat mengenai sasaran, terlebih dahulu mengetahui faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan wilayah yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan.

Berbagai indikator untuk memantau kemajuan di suatu daerah, baik indikator ekonomi maupun indikator sosial. Dalam konteks masyarakat sebagai obyek pembangunan, maka diperlukan indikator untuk mengukur perkembangan kehidupan atau tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.. Untuk melihat

tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi secara umum, indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada di setiap wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka ketimpangan pembangunan suatu wilayah akan berkurang.

Maka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi yang di ukur dari perbedaan kenaikan dan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kabupaten dan kota yang tentunya memiliki berbagai masalah yang harus diatasi seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, dan Kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan Gross Domestik Bruto (GDP) dan Gross National Bruto (GNP) tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan terjadi perbaikan struktur ekonomi atau sistem kelembagaan (Arsyad 2010).

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Untuk mengukur modal manusia, United Nations Development Indeks (UNDP) mengenalkan konsep mutu manusia yang di beri nama IPM. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dan menyerap dan mengelolah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah tersebut berjalan dengan baik, dengan itu ketimpangan

pembangunan yang juga akan semakin meningkat untuk mencapai kearah yang lebih baik dalam pembangunan wilayah (UNDP Shinegi 2013).

Kemiskinan juga merupakan faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan, kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan. Kesenjangan atau ketimpangan suatu wilayah dapat mempengaruhi pendapatan suatu daerah dalam kurung waktu tertentu. Hidup dalam kemiskinan bukan hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawanti, 2005).

Usaha pemerintah untuk meralisasikan pertumbuhan yang efektif dan yang terkendali diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah maupun wilayah, antara lain dengan menerapkan kebijakan yang tepat terkait dengan ketimpangan yang ada disetiap daerah. Karena pentingnya masalah ketidakmerataan pembangunan dalam suatu wilayah.

Maka dari itu penelitian tertarik untuk mengambil judul tentang **“Dampak Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa Timur.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 ?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 ?
3. Apakah Kemiskinan berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 ?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan, berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa Timur 2015-2017?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dampak Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Agar mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017.
- 2) Agar mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017.

- 3) Agar mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa timur tahun 2015-2017.
- 4) Agar mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini akan memberikan ilmu baru bagi peneliti serta meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan menerapkan teori yang telah di ajarkan dan diterima didalam penelitian ini.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi sebagai aplikasi teori ekonomi sehingga dapat menambah referensi untuk mengetahui secara teoritis mengenai ketimpangan pembangunan, selain itu guna menambah literatur untuk mengembangkan penelitian dan ilmu yang akan datang sebagai referensi mengenai penelitian ini.

3) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan meberikan kontribusi kepada pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan juga sebagai masukan untuk menentukan kebijakan yang tepat terkait dengan ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Timur.